

PERAN PENGAWASAN TERHADAP PEMBAGUNAN JALAN PROVINSI DI DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI UPT WILAYAH III PAREPARE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

¹⁾Risnataliya, ²⁾Andi Uceng, ³⁾Rahman Yaqub

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Risnataliya43162132c@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pengawasan Terhadap Pembagunan Jalan Provinsi di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi UPT Wilayah III Pare-Pare Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah staf kantor desa anabanna dan masyarakat desa Anabanna sebanyak 32 orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, Kuisisioner dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pengawasan terhadap pembagunan jalan provinsi di dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi UPT Wilayah III Parepare Kabupaten Sidenreng Rappang pada lokasi desa Anabanna sudah baik dengan rata-rata persentase sebesar 69%. Sedangkan faktor yang mempengaruhi peran pengawasan terhadap pembagunan jalan provinsi di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi UPT Wilayah III Pare-pare Kabupaten Sidenreng Rappang sudah baik dengan rata-rata persentase sebesar 65% dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran / biaya dan Fasilitas Sarana dan prasarana

Kata Kunci : *Peran pengawasan , Pembagunan jalan.*

Abstract

This study aims to determine the role of supervision on the construction of provincial roads in the Department of Highways and Construction of UPT Region III Pare-Pare, Sidenreng Rappang Regency. The population and sample in this study were 32 staff of the Anabanna village office and the Anabanna village community. This study uses a quantitative approach. Data collection techniques by observation, interviews, questionnaires and documentation. The collected data were then analyzed using frequency and percentage tables. The results showed that the role of supervision of the construction of provincial roads in the Department of Bina Marga and Construction of UPT Region III Parepare, Sidenreng Rappang Regency at the Anabanna village location was good with an average percentage of 69%. Meanwhile, the factors affecting the role of supervision of provincial road construction in the Department of Highways and Construction of UPT Region III Pare-pare, Sidenreng Rappang Regency are good with an average percentage of 65% seen from Human Resources (HR), Budget / costs and Facilities. Facilities and infrastructure

Keywords: The role of supervision, road construction

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang - undang No. 38 tahun 2004 tentang jalan, "Jalan adalah bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan dan di kembangkan melalui pendkatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan tiap daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk mempermantap pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional". Pengawasan pekerjaan merupakan salah satu kegiatan yang menjadi tugas jajaran satuan kerja perencanaan dan pengawasan jalan provinsi, dimana pada hakekatnya tujuan dari kegiatan pengawasan pekerjaan adalah untuk membantu satker fisik dalam pelaksanaan pekerjaan.

Akhir-akhir ini kita sering melihat banyak kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya. Kendaraan ini terkadang membuat jalan menjadi semakin padat dari hari ke hari bahkan tidak jarang banyak pengemudi jalan yang ugal-ugalan saat berkendara. "Kepadatan jalan raya yang tidak di imbangi dengan pengetahuan berkendara dapat menimbulkan terjadinya sebuah kecelakaan". Kerusakan jalan yang berada di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Dari data yang ada pada Dinas Bina Marga Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020, dari total panjang jalan Provinsi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mencapai 81 kilometer, "dinyatakan bahwa 24 kilometer mengalami kerusakan dan 2,5 kilometer dianggap mengalami kerusakan berat atau masih berupa jalan tanah. Ada beberapa titik yang sudah sangat membahayakan seperti pada ruas jalan Tanruteddong Dongi bts. Enrekang desa Anabanna tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pengawasan terhadap pembangunan jalan provinsi di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi UPT Wilayah III Parepare kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui Faktor-

faktor yang mempengaruhi peran pengawasan terhadap pembangunan jalan provinsi di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi UPT Wilayah III Parepare Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menurut "Soerjono Soekanto", ialah peran merupakan aspek dinamis kedudukan "status", apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, "maka ia menjalankan suatu peranan". "Soekanto" (2013:213), "menyatakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, sesuai dengan status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena saling tergantung dengan yang lain demikian pula sebaliknya".

Peranan mencakup 3 hal sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam "masyarakat".
2. Peranan yaitu suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau "organisasi".
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi "struktur sosial masyarakat".

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. "Pengawasan merupakan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan oerorganisasi dan manajemen tercapai". "(Hani Handoko 2003)".Selanjutnya menurut "Sondang P.Siagan" "2002" pengawasan dapat diukur dari indikator sebagai berikut :

1. Penetapan Standar "Standar mengandung arti sebagai suatu pengukuran yang dapat digunakan sebagai "patokan" untuk penilai hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar".
2. Memantau "Penetapan standar sia-sia bila tidakdisertai berbagai cara memantau kegiatan sebenarnya. Oleh karena itu tahap kedua dalam sebuah pengawasan yaitu memantau kegiatan secara tepat".
3. Pengukuran Pelaksanaan kegiatan "Setelah frekuensi pengukuran dan

sistem monitoring ditentukan maka pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus”.

4. Membandingkan “Pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan tahap kritis dari proses pengawasan yaitu “pelaksanaan sebenarnya” membandingkan dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan”. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan “(devisiasi)”.
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan “Bila hasil analisa menunjukan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin di ubah, pelaksanaan diperbaiki atau keduanya dilakukan bersamaan”.

Menurut “Sunyoto Usman dalam buku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat” di artikan sebuah usaha dalam meningkatkan segala kemampuan baik dari segi sumber daya manusia “SDM” atau sumber daya alam “SDA”, “hal ini dilakukan dalam rangka mensejahterakan dan memanusiaikan masyarakat yang sering kali hanya batu loncatan untuk meraih sebuah kesuksesan baik oleh masyarakat, kelompok maupun individu”. Menurut “Emil salim” pembangunan berkesinambungan (sustainable development) sebagai “suatu proses perubahan yang di dalamnya “sumber daya, arah, investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan” semuahnya dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia “Kartono & Nurcholis 2016.

Peran pengawasan sangatlah penting dan diperlukan karena tanpa adanya pengawasan “pembangunan jalan tidak akan berjalan dengan baik”. Suatu organisasi akan berjalan terus dan semakin komplek dari waktu ke waktu, banyaknya orang berbuat kesalahan dan guna mengevaluasi atas hasil kegiatan yang telah dilakukan, “inilah yang

membuat fungsi pengawasan semanikn penting. Menurut “Manullang” beberpa faktor yang menjadi penghambat pengawasan infrastruktur jalan tersebut, Sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia (SDM) adalah indivisu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya”.
2. Anggaran atau biaya. Anggaran adalah suatu rncana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu “periode” tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit “moneter”, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana “keuangan”. Dalam anggaran satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan”.
3. Fasilitas sarana dan prasarana. Prasarana adalah suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, “karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai”, prasarana kota merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel yaitu peran pengawasan (bebas) dan pembangunan jalan (terikat)”. Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek atau individu yang sedang dikaji”. Populasi dalam penelitian ini adalah “Keseluruhan komponen yang menjadi objek penelitian, yaitu masyarakat yang ada di desa Anabanna kecamatan pitu riawa yang

berjumlah 32 orang. Menurut “Ahmad” (2015 : 140), “sampel adalah sebagian, atau subset (himpunan bagian), dari suatu populasi. Populasi dapat berisi data yang besar sekali jumlahnya, yang mengakibatkan tidak mungkin atau sulit untuk dilakukan pengkajian seluruh data tersebut, sehingga pengkajian yang dilakukan terhadap sampelnya saja”.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan sebagai berikut”: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Kuesioner atau Teknik Angket.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian peran pengawasan yaitu : penetapan standar Penetapan Standar sangat penting dalam target pelaksanaan pengawasan pembangunan jalan, pencapaian penetapan standar 63,6%. Memantau kegiatan pelaksanaan pembangunan sangat penting dengan pencapaian 83%. Pengukuran Pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam sistem monitoring dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dengan pencapaian 71,2%. Membandingkan kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan nyata 63%. Pengambilan Tindakan Koreksi terhadap gejala penyimpangan dengan pencapaian 40,8%.

Hasil penelitian pembangunan jalan yaitu : Eksploitasi sumber daya secara efisien dan adil dengan pencapaian sebesar 55,5%. Arah yaitu di mana letak suatu pembangunan jalan dengan pencapaian sebesar 76,8%. Investasi berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva pencapaian sebesar 81,2%. Orientasi pengembangan teknologi media hibrida mempermudah membangun dengan pencapaian sebesar 65%. Perubahan kelembagaan yang bertujuan untuk menginternalisasi potensi produktivitas yang lebih besar dengan pencapaian sebesar 72,4%.

Faktor yang mempengaruhi peran pengawasan terhadap pembangunan jalan provinsi yaitu : Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang mempengaruhi produktif yang bekerja dengan pencapaian sebesar 64,2%. Anggaran / biaya merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dengan pencapaian 65%. Fasilitas Sarana

dan prasarana suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dengan pencapaian sebesar 62,4%”.

Hasil olah data diketahui bahwa 5 item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel peran pengawasan dinyatakan valid dengan membandingkan R_{hitung} dengan R_{tabel} . X1 memperoleh nilai “0.409 > 0.349, X2 memperoleh nilai 0.453 > 0.349, X3 memperoleh nilai 0.619 > 0.349, X4 memperoleh nilai 0.593 > 0.349, X5 memperoleh nilai 0.731 > 0.349”, sehingga dapat disimpulkan bahwa lima pertanyaan tentang peran pengawasan dikatakan “valid”.

Berdasarkan hasil olah data diketahui bahwa 5 item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel pembangunan jalan dinyatakan valid dengan membandingkan R_{hitung} dengan R_{tabel} . Y1 memperoleh nilai “0.746 > 0.349, Y2 memperoleh nilai 0.801 > 0.349, Y3 memperoleh nilai 0.472 > 0.349, Y4 memperoleh nilai 0.522 > 0.349, Y5 memperoleh nilai 0.522 > 0.349”, sehingga dapat disimpulkan bahwa lima pertanyaan tentang pembangunan jalan provinsi dikatakan “valid”. Olah data diketahui bahwa 3 item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur faktor yang mempengaruhi peran pengawasan dinyatakan valid “F1 0.593 > 0.349, F2 memperoleh nilai 0.623 > 0.349, F3 memperoleh nilai 0.682 > 0.349”. Berdasarkan hasil olah data diketahui bahwa 3 item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur faktor yang mempengaruhi peran pengawasan dinyatakan “valid”.

Berdasarkan analisis reliabilitas “*cronbach alpha*”. Diketahui nilai cronbach alpha 0.658 dari 13 item pertanyaan. jika nilai Cronbach alpha > nilai R_{tabel} data dapat dikatakan reliabel. Berdasarkan output diperoleh hasil 0.658 > 0.349 sehingga data dapat dikatakan “reliabel”.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil peran pengawasan terhadap pembangunan jalan provinsi di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi UPT Wilayah III Pare-pare Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 64,32% kategori “Berperan. Berdasarkan Hasil pembangunan jalan provinsi di Dinas

Bina Marga dan Bina Konstruksi UPT Wilayah III Pare-pare Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 70,56%". Berdasarkan Hasil Fakto-faktor yang mempengaruhi peran pengawasan terhadap pembangunan jalan provinsi di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi UPT Wilayah III Pare-pare Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 63,86%".

E. DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soerjono, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002): "243"
- Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003): "379".
- Siagian, Sondang. 2004. Manajemen Strategis. Jakarta : Bumi Aksara: "105"
- Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). 52 Pembangunan masyarakat desa dan kota. IPEM4542/M, "1-52"
- Agus Salim. *Perubahan Sosial : Seketsa Teori Dan Metodologi Kasus Di Indonesia*. (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana. 2002: "264".
- Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004: "5").
- Manullang. 2008:172. Dasar – dasar Manajemen, Yogyakarta : Penerbit Gadjah Mada University Press

Dokumen

- Dephub. 2009. Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Jakarta"
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004, Tentang Jalan".